



Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa: Faktor Keuangan dan Nonkeuangan di Desa pada Provinsi Jawa Tengah

Uswatun Hasanah^{1*}, Henny Murtini²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Correspondence: E-mail: uswatunhasanah122003@students.unnes.ac.id¹, hennymurtini@mail.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Pendapatan Asli Desa (PADes) di beberapa desa pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan dan berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor keuangan dan nonkeuangan yang mempengaruhi pertumbuhan PADes pada Provinsi Jawa Tengah periode 2023–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan desa, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Desa melalui teknik dokumentasi, dengan sampel 202 desa dari 32 kabupaten/kota yang dipilih menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 404 observasi. Faktor keuangan meliputi variabel dana desa, sedangkan nonkeuangan terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa wisata, jumlah penduduk, dan Peraturan Desa (PERDes). Pengujian data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan *clogit* dengan bantuan Stata 17, dilengkapi uji ketahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan PERDes berpengaruh negatif, BUMDes, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif, sedangkan desa wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PADes. Hasil pengujian membuktikan terdapat pengaruh positif BUMDes dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan PADes. Penelitian yang akan datang diharapkan menambahkan faktor keuangan misalnya pendapatan BUMDes, dan peluang bisnis desa lainnya. Pemerintah desa pada Provinsi Jawa Tengah diharapkan meningkatkan efektifitas BUMDes dan kondisi penduduk agar PADes juga bertumbuh.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 19 June 2026

First Revised 20 June 2026

Accepted 23 June 2026

First Available online 25 June 2026

Publication Date 25 June 2026

Keyword:

BUMDes, dana desa, desa wisata, jumlah penduduk, Perdes.

1. PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Hatim & Hijrasil, 2024). Kemampuan tersebut tidak hanya berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa juga memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal (Ferraresi, 2026; Hutomo, 2026), optimalisasi sumber pendapatan lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi salah satu indikator utama kemandirian keuangan desa, karena mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi lokal serta kualitas tata kelola keuangan desa oleh aparatur desa (Yangl, 2026). Nilai pertumbuhan PADes yang tinggi menunjukkan kemampuan desa dalam mengembangkan sumber pendapatan sendiri, kondisi tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan desa yang lebih rendah terhadap sumber pendanaan eksternal (Karyada, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa, pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola potensi ekonomi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengelola keuangan desa sesuai kebutuhan masyarakat serta potensi wilayah. Kewenangan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat desa, kebijakan tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Bismo, 2021). Fitria (2021) menjelaskan pertumbuhan PADes bersumber dari hasil usaha desa, pemanfaatan aset desa, partisipasi masyarakat, serta sumber pendapatan sah lainnya. Sumber-sumber tersebut mencerminkan kapasitas ekonomi yang dimiliki desa, pertumbuhan PADes menunjukkan peningkatan kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal dan mencerminkan penguatan kemandirian fiskal desa (Al Hafiz, 2022). Kontribusi pertumbuhan PADes di Provinsi Jawa Tengah relatif rendah dibandingkan dana transfer pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal desa terhadap sumber pendanaan eksternal, mengindikasikan bahwa pengelolaan potensi ekonomi lokal dan pengembangan sumber pendapatan mandiri belum optimal (Agustina, 2021).

Fenomena pengelolaan keuangan desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingginya ketergantungan desa terhadap Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat. Fenomena terlihat pada Desa Krandegan, Kabupaten Purworejo Desa Krandegan menerima Dana Desa sekitar Rp1,05 miliar pada tahun 2025. Jumlah tersebut menurun menjadi sekitar Rp285 juta pada tahun 2026, penurunan memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan desa dan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan desa. Pertumbuhan PADes pada banyak desa masih menunjukkan nilai yang relatif rendah, pertumbuhan PADes belum mampu menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kemandirian fiskal desa (Bakhtiar, 2021). Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan desa terhadap perubahan kebijakan fiskal pemerintah dan menunjukkan pentingnya pembentukan struktur pendapatan desa yang lebih berkelanjutan (Husni, 2023). Lala (2023) menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban telah menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi yang baik. Rosalina (2023) menjelaskan proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat, sedangkan pertanggung jawaban

disampaikan melalui laporan administrasi dan pelaporan fisik yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan (Hutomo, 2026).

Perspektif akuntansi sektor publik menjelaskan bahwa pertumbuhan PADes dipengaruhi oleh Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jumlah penduduk, desa wisata, dan Peraturan Desa. Faktor tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal ((Hilmawan, 2023; Humanika, 2023; Maksimilianus, 2026). Pertumbuhan PADes di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup besar antar desa, mengindikasikan perbedaan tingkat kemandirian fiskal desa. Kondisi menunjukkan pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan PADes. Penelitian ini menggunakan data desa di Provinsi Jawa Tengah periode 2023–2024. Data mengenai total anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) Kabupaten Boyolali selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Total Anggaran PADes 2022-2024

Tahun	PADes
2022	Rp81.533.691.900,00
2023	Rp82.064.402.658,00
2024	Rp65.937.256.051,00

Sumber : Data sekunder yang diolah,2026

Tabel 1 menunjukkan total pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) seluruh desa di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024. Pertumbuhan PADes mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber pendapatan lokal seperti hasil usaha desa, pemanfaatan aset desa, swadaya masyarakat, dan sumber pendapatan sah lainnya. Tahun 2022 total pertumbuhan PADes mencapai 81,53 miliar, nilai tersebut meningkat menjadi 82,64 miliar pada tahun 2023. Peningkatan menunjukkan kondisi pendapatan desa yang relatif stabil pada tahun 2024, total pertumbuhan PADes menurun menjadi 65,937 miliar. Nilai ini mengalami penurunan sekitar 5,94 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PADes menunjukkan melemahnya kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan mandiri. Novatiani (2023) menjelaskan kondisi tersebut mengindikasikan penurunan tingkat kemandirian fiskal desa dan berpotensi mengurangi kapasitas pembiayaan pembangunan desa. Fenomena menunjukkan pentingnya analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan PADes. Agency Theory menjelaskan aparat desa sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan akuntabel. Konsep akuntansi sektor publik menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Teori kemandirian fiskal menjelaskan bahwa kemampuan desa dalam menghasilkan pertumbuhan PADes merupakan indikator utama kemandirian keuangan desa (Mengiste, 2022) .

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan PADes dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keuangan, dan kelembagaan. BUMDes memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan dan kinerja ekonomi desa (Trinanda Ultari, 2024) . BUMDes juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan PADes melalui pengelolaan desa wisata yang transparan dan partisipatif (Leniwati, 2021) . Pengembangan desa wisata berbasis BUMDes mampu meningkatkan PADes melalui optimalisasi potensi lokal (Satya & Asim, 2024) . Pengelolaan aset desa yang efektif dan transparan meningkatkan PADes serta kesejahteraan masyarakat (Fatikasari, 2025).

Rakhmawati (2023) menjelaskan Peraturan Desa (PERDes) memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan BUMDes dan potensi ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata. PERDes yang disusun secara partisipatif dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan ekonomi desa, keberhasilan pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh efisiensi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas biaya operasional. Al Fattah Siman (2024) mengidentifikasi jumlah penduduk menjadi faktor yang relevan karena berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi desa, penelitian pada Desa Wisata Pujon Kidul menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa (Iftitah & Wibowo, 2022).

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan clogit untuk menguji pengaruh Dana Desa, BUMDes, jumlah penduduk, desa wisata, dan PERDes terhadap pertumbuhan PADes. Regresi linear berganda mampu menggabungkan dimensi waktu dan individu dalam satu model analisis. Metode menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan mampu mengontrol perbedaan karakteristik antarunit observasi (McFadden, 1974).

Penelitian penting dilakukan karena memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan PADes di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pada bidang pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Desa, BUMDes, jumlah penduduk, desa wisata, dan PERDes terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kemandirian keuangan desa melalui optimalisasi sumber-sumber PADes secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Agency Theory atau Teori Keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* dalam suatu organisasi. Dalam hubungan tersebut, *principal* merupakan pihak yang memberikan mandat, sedangkan *agent* adalah pihak yang menerima serta melaksanakan mandat tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat desa berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai *agent*. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya serta keuangan desa, termasuk upaya peningkatan pertumbuhan PADes (Wang, 2024).

Lebih lanjut, Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut muncul akibat adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika *agent* memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan *principal*. Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa wisata, serta Peraturan Desa (PERDes). Munir & Rashid (2026) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan pertumbuhan PADes, sehingga pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian pemerintah desa belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara

maksimal. *Andari & Fitria (2023)* mengemukakan bahwa kontribusi *BUMDes* terhadap pertumbuhan *PADes* masih tergolong rendah, sehingga pengembangan potensi ekonomi desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kepentingan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent*.

Dalam penelitian ini, *Agency Theory* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan serta peningkatan *PADes* secara efektif dan bertanggung jawab. Teori ini menggambarkan peran pemerintah desa sebagai *agent* dalam mengelola sumber daya desa melalui berbagai instrumen, seperti Dana Desa, *BUMDes*, desa wisata, jumlah penduduk, dan *PERDes*. Dana Desa berperan dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, *BUMDes* berfungsi mendorong pengembangan usaha desa dan peningkatan pendapatan desa, desa wisata berkontribusi pada aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal, jumlah penduduk mencerminkan potensi tenaga kerja serta kapasitas ekonomi desa, sedangkan *PERDes* berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya desa agar selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (*PADes*) berasal dari kewenangan desa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sumber pertumbuhan *PADes* yang meliputi hasil usaha desa, pemanfaatan aset desa, swadaya masyarakat, gotong royong, dan pendapatan sah lainnya. *Yuswarni (2023)* menjelaskan pertumbuhan *PADes* mencerminkan tingkat kemandirian keuangan desa. Peningkatan pertumbuhan *PADes* menunjukkan peningkatan kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi pertumbuhan *PADes*. *BUMDes* meningkatkan pertumbuhan *PADes* melalui pengelolaan usaha desa yang produktif (*Zakiyah & Resdiana, 2023*). Pengembangan potensi ekonomi dan unit usaha desa meningkatkan kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan (*Aurelia et al., 2025*). Desa wisata mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa (*Ketrin, 2025; Putra, 2024*). Jumlah penduduk mencerminkan potensi tenaga kerja dan kapasitas ekonomi desa yang dapat meningkatkan pertumbuhan *PADes* (*Mushodiq, 2025*). Peraturan Desa mengatur pengelolaan sumber daya desa dan mendukung peningkatan pertumbuhan *PADes* (*Atmayanti, 2023*). *Jensen & Meckling (1976)* menjelaskan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah desa mengelola Dana Desa, *BUMDes*, desa wisata, jumlah penduduk, dan *PERDes* untuk meningkatkan pertumbuhan *PADes*. Keberhasilan pengelolaan faktor-faktor tersebut meningkatkan pertumbuhan *PADes* dan memperkuat kemandirian keuangan desa.

Dana Desa

Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*APBN*). *Lasriati (2025)* menjelaskan pemerintah menyalurkan Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBD*) kabupaten/kota kepada desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan desa yang berkelanjutan. Dana Desa mendorong pertumbuhan ekonomi desa,

Pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, dan pemberdayaan masyarakat (Rahayu, 2023). Sari (2025) menjelaskan pengelolaan Dana Desa yang optimal meningkatkan aktivitas ekonomi desa, peningkatan aktivitas ekonomi desa mendorong pertumbuhan PADes, pengelolaan Dana Desa yang kurang efektif meningkatkan ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah. Renaldy (2024) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa, Dana Desa meningkatkan aktivitas ekonomi dan kapasitas pembangunan desa. Hajri & Razak (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat, pemerintah desa mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, ekonomi lokal, dan meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Nasuha, 2024).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki seluruh modal yang berasal dari desa melalui penyertaan modal desa. BUMDes mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur pembentukan BUMDes. Regulasi tersebut mendorong BUMDes untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, serta mendorong peningkatan pertumbuhan PADes dan penguatan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat (Nugraha, 2026). BUMDes meningkatkan pertumbuhan PADes melalui aktivitas usaha desa, pengelolaan BUMDes yang efektif meningkatkan pendapatan desa. Zakiyah (2023) menemukan bahwa BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap PADes dengan kontribusi 67,6 persen. Aurelia (2025) menemukan bahwa pengembangan unit usaha, digitalisasi, dan peningkatan sumber daya manusia meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Rosbarnawan (2025) menemukan bahwa jumlah unit usaha dan penyertaan modal desa meningkatkan kinerja BUMDes. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai agent dalam pengelolaan sumber daya desa, pemerintah desa mengelola BUMDes secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat sebagai principal, pengelolaan BUMDes yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan yang efektif meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pertumbuhan PADes. BUMDes berperan dalam peningkatan pertumbuhan PADes jumlah BUMDes aktif mencerminkan kinerja pengelolaan ekonomi desa, Data BUMDes berasal dari pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Yuswarni, 2023).

Desa Wisata

Desa wisata kawasan pedesaan yang memiliki potensi wisata berupa keindahan alam, budaya, adat istiadat, serta ekonomi kreatif masyarakat yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan PADes melalui optimalisasi potensi lokal. Munir & Rashid (2026) menyatakan pengembangan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan desa dari retribusi wisata, pengelolaan fasilitas, dan penjualan produk lokal. Ketrin (2025) menunjukkan bahwa desa wisata dapat meningkatkan pertumbuhan PADes melalui wisata tematik dan pemberdayaan

UMKM, serta membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diperkuat oleh (Putra, 2024) yang menyatakan bahwa desa wisata berdampak positif terhadap ekonomi kreatif dan pendapatan desa. Mengiste (2022) dalam perspektif *Agency Theory*, pemerintah desa sebagai *agent* memiliki tanggung jawab mengelola potensi wisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat sebagai *principal* melalui penyediaan fasilitas, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan kebijakan dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Desa wisata menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan PADes. Penelitian ini diukur berdasarkan jumlah desa wisata aktif yang terdaftar pada Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah (Raden & Ajeng Kartika Galuh, 2024).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk keseluruhan masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dan menjadi indikator penting dalam pembangunan desa karena mencerminkan potensi sumber daya manusia, aktivitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketrin Nona Aflora Veronika (2025) menemukan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin tinggi aktivitas ekonomi seperti konsumsi, perdagangan, dan pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penerimaan desa, sekaligus memperbesar potensi tenaga kerja dan produktivitas masyarakat. Mushodiq & Mafruhah (2025) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (Rahmatika, 2025) jumlah penduduk dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Desa terhadap belanja desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Perspektif *Agency Theory*, masyarakat bertindak sebagai *principal* sedangkan pemerintah desa sebagai *agent* yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, sehingga semakin besar jumlah penduduk semakin tinggi pula tuntutan terhadap pemerintah desa (Rosalina, 2023). Jumlah penduduk menjadi faktor penting yang dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa apabila tidak dikelola secara optimal (Prianto, 2023).

Peraturan Desa (PERDes)

Peraturan Desa (PERDes) peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya desa, termasuk pengaturan BUMDes, desa wisata, Dana Desa, dan aset desa yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Peraturan Desa menjadi dasar hukum dalam optimalisasi potensi ekonomi desa sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat serta penguatan pengelolaan usaha desa secara lebih efektif (Hamid, 2022). Peraturan Desa berperan dalam memperkuat pengelolaan BUMDes dan desa wisata secara partisipatif dan transparan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa serta kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi desa (Rakhmawati, 2023). Munir & Rashid (2026) dalam perspektif *Agency Theory*, peraturan desa berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pemerintah desa sebagai *agent* menjalankan pengelolaan sumber daya sesuai kepentingan masyarakat sebagai *principal*, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Peraturan Desa menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang berkaitan

dengan pengelolaan BUMDes, Dana Desa, dan pengembangan desa wisata berdasarkan data pemerintah desa (Wang, 2024).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Desa terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Dana Desa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa melalui pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hilmawan (2023) menjelaskan dana ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pengembangan ekonomi desa. Febri (2014) berpendapat semakin besar dan efektif pengelolaan dana desa, semakin besar pula peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan PADes. Faoziyah (2020) menyatakan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan PADes melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Firmansyah (2025) menegaskan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan potensi dan fasilitas desa. Perspektif *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976) pemerintah desa sebagai *agent* berkewajiban mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Dana Desa secara teori memiliki pengaruh positif terhadap PADes karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Dana Desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) badan usaha yang modalnya dimiliki desa dan digunakan untuk mengelola aset, jasa, serta usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes berperan penting dalam penguatan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, serta pengembangan berbagai unit usaha seperti perdagangan, jasa, wisata, simpan pinjam, dan pengelolaan air bersih, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat menjadi sumber PADes (Yang, 2026). Ika (2022) berpendapat semakin baik pengelolaan dan semakin berkembang unit usaha BUMDes, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan PADes karena mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Faoziyah (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan unit usaha *BUMDes* berpengaruh positif terhadap pendapatan desa melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai institusi lokal yang penting dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui kolaborasi multipihak (Nugraha, 2026). BUMDes tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan tata kelola desa sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan lokal seperti BUMDes menjadi area strategis yang memiliki pengaruh tinggi terhadap keberhasilan pengembangan desa wisata dan pembangunan desa. Perspektif *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai *agent* berkewajiban mengelola BUMDes secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai *principal* dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pertumbuhan PADes, dapat disimpulkan bahwa BUMDes berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, maka hipotesis dalam penelitian ini Adalah:

H₂: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pengaruh Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Desa wisata kawasan pedesaan yang memiliki potensi wisata berupa keindahan alam, budaya, adat istiadat, dan ekonomi kreatif masyarakat yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan PADes. Wang (2024) berpendapat pengembangan desa wisata menjadi strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi lokal berbasis masyarakat karena mampu mendorong aktivitas ekonomi seperti kuliner, homestay, jasa pemandu wisata, UMKM, dan usaha ekonomi kreatif lainnya, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan desa melalui retribusi, pengelolaan fasilitas wisata, serta kontribusi BUMDes. Raden (2024) menemukan desa wisata berpengaruh positif terhadap PADes karena meningkatkan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi sedangkan Elok (2024) menemukan bahwa desa wisata meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Perspektif *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai *agent* bertanggung jawab mengelola potensi wisata secara efektif dan akuntabel untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai *principal* dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan PADes. Munir & Rashid (2026) berpendapat semakin berkembangnya desa wisata maka semakin besar pula potensi peningkatan pertumbuhan PADes melalui aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata, maka hipotesis dalam penelitian ini Adalah:

H₃: Desa Wisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Jumlah penduduk keseluruhan masyarakat yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah pada waktu tertentu Badan Pusat Statistik (BPS), dan menjadi indikator penting pembangunan karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik. Arifin (2020) menjelaskan jumlah penduduk mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan pasar desa, usaha desa, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang dikelola pemerintah desa maupun BUMDes. Yusron (2025) menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah karena meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai *agent* memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai *principal*, semakin besar jumlah penduduk semakin tinggi tuntutan pelayanan dan pembangunan yang mendorong pengelolaan ekonomi desa yang lebih optimal. Wang (2024) menjelaskan secara teoritis bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat desa, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pengaruh Peraturan Desa terhadap Pendapatan Asli Desa

Peraturan Desa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rakhmawati (2023) menjelaskan peraturan desa berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan PADes karena menjadi dasar hukum pengelolaan potensi ekonomi desa seperti BUMDes, desa wisata, aset desa, dan Dana Desa sehingga pengelolaan dapat lebih efektif, transparan, dan terarah. Wahyu Prianto (2023) menunjukkan regulasi desa yang baik dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan usaha desa. Tias (2026) berpendapat keberadaan aturan lokal yang memperoleh legitimasi formal dari negara mampu memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menegakkan aturan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kerangka hukum yang jelas serta selaras dengan kondisi lokal dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi masyarakat. Perspektif *Agency Theory* Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai agent bertanggung jawab kepada masyarakat desa sebagai principal dalam mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel, peraturan desa berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian. Semakin baik kualitas peraturan desa maka semakin efektif pengelolaan potensi desa dan semakin meningkat pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, maka hipotesis dalam penelitian ini Adalah:

H₅: Peraturan Desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan landasan positivisme dan metode deduktif untuk menguji pengaruh dana desa, jumlah penduduk, desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Peraturan Desa (PERDes) terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan desa, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Desa melalui teknik dokumentasi, dengan sampel 202 desa dari 32 kabupaten/kota yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kelengkapan data, sehingga diperoleh 404 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PADes, sedangkan variabel independen terdiri dari dana desa, BUMDes, desa wisata, jumlah penduduk, dan PERDes yang diukur menggunakan indikator sesuai karakteristik masing-masing variabel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi *clogit* dengan bantuan *Stata* versi 17, setelah melalui analisis statistik deskriptif dan uji *clogit* untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui *Conditional Logistic Regression (clogit)* dan *Logistic Regression (logistic, robust)* untuk melihat pengaruh parsial, simultan, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi PADes. Beberapa pendekatan estimasi digunakan seperti *Robust Standard Error*, Logistik kondisional, dan sensitivitas dengan variabel moderasi untuk membandingkan robustnya sebagai uji ketahanan hasil untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas model penelitian. Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi definisi masing-masing variabel beserta pengukurannya, disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
----------	----------	------------

Pertumbuhan PADes (Y)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) perubahan atau peningkatan PADes dari tahun sebelumnya yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli desa (Nafiah , 2023).	$\frac{PADest - PADest-1}{PADest-1} \times 100\%$
Dana Desa (X ₁)	Dana Desa dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Iftitah & Wibowo, 2022).	Total realisasi Dana Desa
BUMDes (X ₂)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan digunakan untuk mengelola potensi ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah, 2025).	Variabel dummy (1 = memiliki BUMDes aktif, 0 = tidak memiliki BUMDes aktif)
Desa Wisata (X ₃)	Desa Wisata desa yang memiliki potensi wisata yang dikelola sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.	Variabel dummy (1 = memiliki Desa Wisata, 0 = tidak memiliki Desa Wisata)
Jumlah Penduduk (X ₄)	Jumlah penduduk banyaknya penduduk yang berdomisili di suatu desa pada periode tertentu yang menggambarkan ukuran populasi desa.	Jumlah penduduk (jiwa) berdasarkan data BPS
PERDes (X ₅)	Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) regulasi yang ditetapkan pemerintah desa sebagai dasar hukum pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PADes.	Variabel dummy (1 = memiliki Perdes PADes, 0 = tidak memiliki Perdes PADes)

Sumber : Data sekunder yang diolah,2026

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini desa-desa di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes), dana desa, jumlah penduduk, desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peraturan desa (PERDes) selama periode 2023–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi pemerintah desa, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan keuangan desa, serta sumber resmi pemerintah lainnya yang relevan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria desa yang memiliki kelengkapan data seluruh variabel penelitian selama periode 2023–2024 dan dapat diakses melalui sumber resmi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel dari 32 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total 202 desa dan 404 observasi yang berasal dari penggabungan data tahunan, sedangkan desa yang tidak memenuhi kelengkapan data tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan merupakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari desa-desa di Provinsi Jawa Tengah periode 2023–2024, bersumber dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan keuangan desa, website resmi pemerintah desa, publikasi Badan Pusat Statistik, serta sumber resmi pemerintah lainnya. Analisis ini mencakup variabel

pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes), dana desa, jumlah penduduk, desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peraturan desa (PERDes), di mana *mean* digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai minimum dan maksimum untuk melihat batas terendah dan tertinggi data, serta standar deviasi untuk mengukur tingkat penyebaran data, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Yd	404	0,50	0,50	0,00	1,00
Dana Desa (X1)	404	1.207,80	959,81	1,30	13.311,44
BUMDes (X2)	404	0,77	0,42	0,00	1,00
Desa Wisata (X3)	404	0,37	0,48	0,00	1,00
Jumlah Penduduk (X4)	404	4.638,61	339,12	805,00	22.504,00
PERDes (X5)	404	0,74	0,44	0,00	1,00

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata MP versi 17, 2026

Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 404 data. Variabel dependen (Yd) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,50 dengan standar deviasi sebesar 0,05. Nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa variable Yd variable *dummy* yang hanya memiliki dua kategori nilai, yaitu 0 dan 1. Nilai rata-rata sebesar 0,50 mengindikasikan bahwa proporsi observasi yang memiliki nilai 1 relatif seimbang dengan yang memiliki nilai 0. Variabel Dana Desa memiliki nilai rata-rata sebesar 1.207,80 dengan standar deviasi sebesar 959,81. Nilai minimum sebesar 1,30 dan nilai maksimum sebesar 13.311,4 menunjukkan adanya variasi dana desa yang cukup besar antar desa dalam sampel penelitian. Besarnya standar deviasi mengindikasikan bahwa distribusi dana desa cenderung menyebar dan tidak merata pada seluruh observasi. BUMDes memiliki nilai rata-rata sebesar 0,77 dengan standar deviasi sebesar 0,42. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sekitar 77% desa dalam sampel telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan sisanya belum memiliki BUMDes. Nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00 menunjukkan bahwa variabel ini merupakan variabel *dummy*. Desa Wisata memiliki nilai rata-rata sebesar 0,37 dengan standar deviasi sebesar 0,48. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 37% desa dalam sampel penelitian telah ditetapkan atau berkembang sebagai desa wisata, sedangkan sekitar 63% lainnya belum termasuk desa wisata. Variabel ini juga merupakan variabel *dummy* dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Jumlah Penduduk memiliki nilai rata-rata sebesar 4.638,61 jiwa dengan standar deviasi sebesar 3.339,12 jiwa. Nilai minimum sebesar 805 jiwa dan nilai maksimum sebesar 22.504 jiwa menunjukkan adanya perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan antar desa dalam sampel penelitian. Besarnya standar deviasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk antar desa memiliki tingkat variasi yang relatif tinggi. PERDes memiliki nilai rata-rata sebesar 0,74 dengan standar deviasi sebesar 0,44. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sekitar 74% desa dalam sampel penelitian telah memiliki Peraturan Desa (PERDes) atau Peraturan Kepala Desa (Perkades), sedangkan sekitar 26% desa lainnya belum memilikinya.

Pengujian Model Regresi

Logistik Kondisional

Model Regresi Logistik Kondisional (*Conditional Logistic Regression/CLOGIT*) digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berbentuk dikotomis (*dummy*), yaitu memiliki dua kategori, seperti 0 dan 1. Model *clogit* digunakan untuk menguji pengaruh Dana Desa, BUMDes, Desa Wisata, Jumlah Penduduk, dan

PERDes terhadap peluang terjadinya variabel dependen (Yd). Hasil pengujian regresi logistik kondisional terhadap variabel penelitian disajikan pada Tabel 4, yang memuat nilai koefisien, tingkat signifikansi, serta keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji logistik kondisional

Variabel	Koefisien	Sig.	Keterangan
Dana Desa (X1)	-0,00	0,01	H ₁ ditolak
BUMDes (X2)	0,37	0,00	H ₂ diterima
Desa Wisata (X3)	0,10	0,37	H ₃ ditolak
Jumlah Penduduk (X4)	0,01	0,00	H ₄ diterima
PERDes (X5)	-0,12	0,00	H ₅ ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata MP versi 17, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Yd). Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dana Desa memiliki koefisien sebesar -0,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,01. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap Yd. Koefisien yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan dana desa cenderung menurunkan peluang terjadinya Yd. BUMDes memiliki koefisien sebesar 0,37 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Yd. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perkembangan BUMDes, maka peluang terjadinya Yd semakin meningkat. Desa Wisata memiliki koefisien sebesar 0,10 dengan nilai signifikansi sebesar 0,37. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka desa wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Yd. Dengan demikian, keberadaan desa wisata belum mampu menjelaskan perubahan pada variabel Yd secara statistik. Jumlah Penduduk memiliki koefisien sebesar 0,01 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Yd. Jumlah penduduk cenderung meningkatkan peluang terjadinya Yd. PERDes memiliki koefisien sebesar -0,12 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai tersebut menunjukkan PERDes berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Yd, peningkatan PERDes cenderung menurunkan peluang terjadinya Yd.

Uji Sensitivitas

Uji Sensitivitas dilakukan untuk menghasilkan model utama *Logistic Regression* dengan model alternatif *Conditional Fixed-Effects-Logistic Regression (Clogit)*. Pengujian bertujuan untuk mengetahui bahwa hasil konsisten. Tabel 5 berikut menyajikan hasil uji sensitivitas yang diperoleh dari estimasi menggunakan model Clogit Robust dan Logistic Robust.

Tabel 5. Hasil Uji Sensitivitas

Variabel	Ys (Clogit Robust)	Yd (Logistic Robust)
Dana Desa (X1)	-0,00**	1,00
BUMDes (X2)	0,37***	0,75
Desa Wisata (X3)	0,10	1,60
Jumlah Penduduk (X4)	0,01***	0,99
PERDes (X5)	0,12***	0,50*
Observasi	404	404
R ²	0,08	0,30

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata MP versi 17, 2026

Tabel 5 menunjukkan bahwa dana desa memiliki koefisien sebesar 1,00 dan tidak menunjukkan tanda signifikansi statistik. Hasil ini mengindikasikan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya Yd. Pada model *Clogit Robust* (Ys), dana desa memiliki koefisien sebesar -0,00 dan signifikan pada tingkat 5% (**). Hasil ini menunjukkan dana desa berpengaruh negatif terhadap Ys. Meskipun nilai koefisien relatif kecil, peningkatan dana desa cenderung menurunkan probabilitas terjadinya Ys, hipotesis pengaruh dana desa terhadap Ys dapat diterima. BUMDes pada model *Logistic Robust* (Yd) memiliki koefisien sebesar 0,75, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan keberadaan BUMDes belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap Yd. Pada model *Clogit Robust* (Ys), BUMDes memiliki koefisien sebesar 0,37 dan signifikan pada tingkat 1% (***), Keberadaan BUMDes meningkatkan peluang terjadinya Ys. Hasil ini mengindikasikan bahwa desa yang memiliki BUMDes cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik pada variabel Ys dibandingkan desa yang tidak memiliki BUMDes. Desa Wisata memiliki koefisien sebesar 1,60 pada model *Logistic Robust* dan 0,10 pada model *Clogit Robust* Kedua koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik karena tidak memiliki tanda signifikansi. Hasil ini menunjukkan status desa wisata belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Yd maupun Ys. Keberadaan desa wisata belum dapat dijadikan faktor utama yang menentukan perubahan pada kedua variabel dependen dalam penelitian ini, Pada model *Logistic Robust* (Yd), jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar 0,99 dan tidak signifikan secara statistik. Jumlah penduduk tidak terbukti memengaruhi Yd, pada model *Clogit Robust* (Ys), jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar 0,01 dan signifikan pada tingkat 1% (***), nilai koefisien terlihat sangat kecil akibat satuan pengukuran yang besar, hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Ys. Semakin besar jumlah penduduk suatu desa, semakin besar pula peluang terjadinya Ys. Variabel PERDes pada model *Logistic Robust* (Yd) memiliki koefisien sebesar 0,50 dan signifikan pada tingkat 10% (*), hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan PERDes berpengaruh positif terhadap Yd. Desa yang memiliki PERDes cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kondisi yang direpresentasikan oleh Yd dibandingkan desa yang tidak memiliki PERDes. Pada model *Clogit Robust* (Ys) PERDes memiliki koefisien sebesar 0,12 dan signifikan pada tingkat 1% (***), menunjukkan bahwa keberadaan PERDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ys, regulasi desa berperan dalam meningkatkan peluang tercapainya outcome yang diukur oleh variabel Ys. Nilai R² pada model *Logistic Robust* sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 30% variasi Yd dapat dijelaskan oleh dana desa, BUMDes, desa wisata, jumlah penduduk, dan PERDes, sedangkan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. R² pada model *Clogit Robust* sebesar 0,08, yang berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan sekitar 8% variasi Ys, sedangkan 92% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel independen dalam penelitian. Pengujian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan toleransi, dengan kriteria VIF < 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 6, ditampilkan hasil uji

multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance (1/VIF) pada setiap variabel independen dalam penelitian.

Tabel 6. Hasil dari VIF

Variabel	VIF	1/VIF
Dana Desa (X1)	1,03	0,97
Jumlah Penduduk (X4)	1,03	0.98
BUMDes (X2)	1,01	0.99
Desa Wisata (X3)	1,01	0.99
PERDes (X5)	1,01	0.99
Mean VIF	1,02	

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata MP versi 17, 2026

Tabel 6. menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance (1/VIF) di atas 0,10. Variabel dana desa dan jumlah penduduk memiliki nilai VIF sebesar 1,03, sedangkan variabel BUMDes, desa wisata, dan PERDes memiliki nilai VIF sebesar 1,01. Nilai Mean VIF sebesar 1,02 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat korelasi antar variabel independen sangat rendah. Menurut kriteria umum, model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian, sehingga variabel dana desa, BUMDes, desa wisata, jumlah penduduk, dan PERDes layak digunakan dalam analisis regresi karena tidak saling memengaruhi secara kuat.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil pengujian model *Conditional Logistic Regression (Clogit)*, dana desa memiliki koefisien sebesar -0,00 dengan nilai signifikansi 0,012 (< 0,05), sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PADes ditolak. Hasil ini menunjukkan peningkatan dana desa justru cenderung menurunkan peluang terjadinya pertumbuhan PADes. Ferraresi (2026) menjelaskan bahwa dana desa termasuk transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Faoziyah & Salim (2020) menemukan bahwa dana desa tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan asli secara mandiri. Kondisi ini dapat terjadi karena sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan sosial yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi desa. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah dapat mengurangi dorongan desa untuk menggali sumber-sumber PADes yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan PADes secara langsung.

Dana Desa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pembiayaan kegiatan produktif seperti pengembangan UMKM, wisata desa, pasar desa, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berdampak pada peningkatan PADes. Dana desa juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang memperlancar distribusi dan perdagangan masyarakat desa. Hasil ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas fiskal desa dalam pembangunan dan

pelayanan publik, serta didukung oleh penelitian Tias (2026) yang menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan PADes. Terdapat pula penelitian lain yang menunjukkan hasil berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan kualitas pengelolaan dana desa, kapasitas aparatur desa, serta variasi potensi ekonomi antar desa (Renaldy, 2024).

Pengaruh BUMDes terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil pengujian model *Conditional Logistic Regression (Clogit)* menunjukkan bahwa variabel BUMDes memiliki koefisien sebesar 0,37 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PADes. Hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan peluang pertumbuhan PADes (Ultari & Khoirunurrofik, 2024). BUMDes salah satu instrumen ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi dan aset desa untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan desa. Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, seperti perdagangan, jasa, wisata desa, penyewaan aset, dan pengelolaan potensi lokal lainnya, BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan PADes (Hutomo, 2026). Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis desa yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal dalam meningkatkan kemandirian fiskal desa. Desa yang memiliki BUMDes yang aktif dan dikelola secara profesional cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan sumber pendapatan baru dibandingkan desa yang belum memiliki atau belum mengoptimalkan BUMDes (Sari & Ilham, 2024).

Desa yang memiliki BUMDes cenderung memiliki pertumbuhan PADes yang lebih tinggi dibandingkan desa tanpa BUMDes karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dan mengoptimalkan potensi lokal seperti wisata, pertanian, perdagangan, dan jasa. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi desa yang menekankan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi lokal dapat meningkatkan kemandirian desa serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, serta mendukung penelitian (Nugraha, 2026) menyatakan bahwa BUMDes berpengaruh positif terhadap peningkatan PADes. Sebagian desa masih belum memperoleh dampak optimal akibat keterbatasan pengelolaan, sumber daya manusia, modal, dan inovasi usaha (Budiyanto & Purnomo, 2021).

Pengaruh Desa Wisata terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil pengujian model *Conditional Logistic Regression (Clogit)* menunjukkan bahwa variabel Desa Wisata memiliki koefisien sebesar 0,10 dengan nilai signifikansi 0,369 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hipotesis ketiga (H_3) ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PADes selama periode penelitian. Desa wisata dapat menjadi sumber pendapatan melalui retribusi wisata, pengelolaan destinasi, maupun aktivitas ekonomi masyarakat, namun tidak semua desa wisata mampu mengelola potensinya secara optimal (Putri, 2021). Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih terbatasnya fasilitas wisata, rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, kurang optimalnya promosi wisata, serta belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Akibatnya, keberadaan desa wisata belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan PADes secara statistik (Rakhmawati, 2023).

Pengembangan desa wisata juga mendorong peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi

lokal. Desa yang memiliki desa wisata cenderung menunjukkan PADes yang lebih tinggi dibandingkan desa tanpa pengembangan wisata, meskipun kontribusinya dapat berbeda tergantung pada kualitas pengelolaan, fasilitas, promosi, dan partisipasi masyarakat. Hasil ini tidak sejalan dengan teori pembangunan berbasis potensi lokal serta penelitian (Mushodiq & Mafruhah, 2025) menyatakan bahwa desa wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan yang berkelanjutan dan profesional.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil pengujian model *Conditional Logistic Regression (Clogit)* menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar 0,01 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hipotesis keempat (H_4) diterima, hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu desa, semakin besar pula peluang terjadinya pertumbuhan PADes. Jumlah penduduk yang tinggi mencerminkan potensi sumber daya manusia yang lebih besar dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa (Khan, 2023). Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang produktif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penelitian (Raden, 2024) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Dampak positif tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kualitas SDM yang memadai, sehingga diperlukan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas masyarakat agar pertumbuhan PADes dapat terus berkelanjutan (Husni, 2023).

Pengaruh Peraturan Desa (PERDes) terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil model *Conditional Logistic Regression (Clogit)* menunjukkan bahwa variabel Peraturan Desa (PERDes) memiliki koefisien sebesar -0,12 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan PERDes berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PADes ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan PERDes belum mampu mendorong pertumbuhan PADes secara langsung. Peningkatan jumlah regulasi desa cenderung menurunkan peluang pertumbuhan PADes. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyaknya regulasi yang dimiliki desa belum tentu diikuti dengan implementasi yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi desa (Elok Puri Maharani, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas regulasi lebih penting daripada kuantitas, karena PERDes yang sedikit namun efektif lebih mampu mendorong peningkatan PADes dibandingkan regulasi yang banyak tetapi tidak berjalan optimal. Hasil ini berbeda dengan teori kebijakan publik serta penelitian (Tias, 2026) menyatakan bahwa regulasi desa dapat meningkatkan pendapatan desa, sehingga perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh variasi kualitas implementasi kebijakan, kapasitas aparatur, dan karakteristik ekonomi desa (Hamid, 2022).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Provinsi Jawa Tengah periode 2023–2024 dengan

menggunakan regresi *clogit* berbasis data 202 desa (404 observasi) yang diolah menggunakan Stata 17, dengan variabel independen Dana Desa, BUMDes, Desa Wisata, Jumlah Penduduk, dan PERDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan PERDes berpengaruh negatif, BUMDes dan jumlah penduduk berpengaruh positif, sedangkan desa wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PADes. Nilai *Pseudo R²* sebesar 0,7% menunjukkan bahwa kemampuan variabel dalam menjelaskan variasi PADes masih terbatas, sehingga terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada cakupan variabel, wilayah, serta periode penelitian, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti kemiskinan, kualitas aparatur desa, dan potensi sumber daya desa, memperluas wilayah penelitian, serta menggunakan metode analisis yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif dan kuat.

5. REFERENCES

- Abdul Hamid, A. S. N. (2022). *Perdes berpengaruh terhadap pendapatan asli desa*. Rakhmawati Tri Atmayanti, Machwal Huda, & Hudallah Hudallah. (2023). Peran peraturan desa nomor 07 tahun 2021 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejahtera Barokah Banjarsari terhadap potensi wisata taman Banjarsari Agro. Community (BAC) di Desa Banjarsari. *Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, *2*(4), 199–206. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2638>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An evidence of the implementation of village funds (dana desa) in Indonesia. *Journal of regional and city planning*, *31*(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Febri, D., Kurrohman, A. T., & Jember, U. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. In *jurnal riset akuntansi dan keuangan* (Vol. 2, Number 3).
- Ferraresi, M., Herrmann, B., Loiacono, L., Rizzo, L., & Secomandi, R. (2026). Does fiscal autonomy increase local income? Evidence from Italy. *European journal of political economy*, *93*, 102816. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2026.102816>
- Hatim, F., & Hijrasil, H. (2024). The effect of PAD, DAU, DAK, BHSDA, Investment, and Economic Growth on poverty in north Maluku Province. *International journal of social science and business*, *8*(2), 317–327. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i2.75392>
- Herdiana, D., Qadri, R. A., Sutarto, S., Kustiani, N. A., & Andriana, N. (2024). The interplay between the otsus fund, capital expenditure, and regional economic performance in Aceh Province. *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis*, *19*(1), 151. <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i01.p10>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of open innovation: Technology, market, and complexity*, *9*(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>

- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of accounting and investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Hutomo, F., Utomo, S. W., Soesilo, T. E. B., Haryanto, J. T., Rahawarin, M. F., & Sakina, N. A. (2026). Building sustainability frameworks for tourism villages in Yogyakarta, Indonesia: An interpretive structural modeling approach. *Social sciences and humanities open*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102852>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gowa. *Jurna ilmu pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Khan, Z., Taimoor, H., Kirikkaleli, D., & Chen, F. (2023). Editorial: The role of fiscal decentralization in achieving environmental sustainability in developing and emerging economies. In *frontiers in environmental science* (Vol. 10). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1102929>
- Lala, A., Erwandi, A., Oevang, J. Y. C., Nomor, O., & Kalimantan Barat, S. (n.d.). *Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa*.
- McFadden, D. (1974). *Clogit*.
- Mengiste, B. W. (2022). Agency Theory: Its discourse and practice in the selected public-sectors. *Journal of social sciences and management studies*, 1(4), 34–43. <https://doi.org/10.56556/jssms.v1i4.342>
- Muhammad Rafi Akbar Nasuha, Afrizal Afrizal, & Kustiawan Kustiawan. (2024). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 2023. *Populer: Jurnal penelitian mahasiswa*, 3(3), 153–167. <https://doi.org/10.58192/populer.v3i3.2438>
- Munir, S., & Rashid, M. (2026). Tourism, governance, and infrastructure as drivers of economic growth in high-income european economies: An autoregressive distributed Lag (ARDL) analysis (1999–2023). *Strategic business research*, 2(1), 100199. <https://doi.org/10.1016/j.sbr.2026.100199>
- Novi Andari, R., & Fitria, R. (2023). Village gunds policy and its impact on improvement and autonomy status of villages in indonesia. *Kne social sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13537>
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Rahmawati, Dinanti, D., Subagiyo, A., Wijayati, W. P., & Aledah, M. (2026). Resilient by design: Multistakeholder collaboration and community capitals for sustainable rural tourism in indonesia. *Sustainable futures*. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2026.101772>
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (survei pada desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>

- Raden, M. F. F., & Ajeng Kartika Galuh. (2024). Implikasi kawasan wisata terhadap perekonomian desa Pujon Kidul. *Journal of development economic and social studies*, 3(4), 1015–1025. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.04>
- Rahayu Husen, S., Bidullah Suwardi Zakaria Program Studi Ekonomi Pembangunan, T., Ekonomi, F., Tompotika Luwuk, U. Kesejahteraan masyarakat di desa Bonggan dan bagaimanakah signifikan antara pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Bonggan tujuan, T. (2023). *Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Bonggan*. *The effect of village fund allocation on community welfare in Bonggan village abstrak rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh alokasi dana desa*. 11(1), 1–6. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jip>
- Rosalina, P. D., Dupre, K., Wang, Y., Putra, I. N. D., & Jin, X. (2023). Rural tourism resource management strategies: A case study of two tourism villages in Bali. *Tourism management perspectives*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101194>
- Sari, A., & Ilham, T. (2024). A deep dive into the success of joint village-owned enterprises (Joint-BUMDes) in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling (ISM) approach. *Jurnal bina praja*, 16(1), 215–233. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.215-233>
- Sari, N., Zain Olilingo, F., Santoso, I. R., Mopangga, H., Hadi, F., & Akib, Y. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara*. 5(2). <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>
- Sari, S. G., Dwiputri, I. N., W., & Parhah, S. (2024). Variables affecting young unemployment in Indonesia. *Kne social sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i21.16758>
- Tias, P. A., McDermott, C. L., & Mulyani, M. E. (2026). Navigating the nexus between customary norms and state laws in shaping rural forest governance: A case study in Aceh Province, Indonesia. *Forest policy and economics*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103672>
- Tityanda Putri, C., Wardiyanto, B., & Suaedi, F. (n.d.). *Policy evaluation of village fund through an agro-tourism village for sustainable local development evaluasi kebijakan dana desa melalui desa wisata agro guna menciptakan pembangunan local berkelanjutan*.
- Trinanda Ultari, & Khoirunurrofik, K. (2024). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. *Jurnal perencanaan pembangunan: The Indonesian journal of development planning*, 8(2), 256–280. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>
- Wahyu Prianto, F., Firhan, H., Yunitasari, D., Hadi Priyono, T., Perwitasari Wiryaningtyas, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Jember, U., & Abdurachman Saleh Situbondo, U. (2023). *Gorontalo development review apakah pertumbuhan ekonomi, upah, kapasitas fiskal dan tipe geografi berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur? Do factors like capacity, wage, growth, and type of geography have an impact on poverty in east Java?*
- Wang, L., Ding, X., Hong, M., Xiong, W., & Tan, Y. (2024). Exploring changes and influencing factors of farmers' welfare in different villages under the background of homestead

system reform. *Habitat International*, 153.
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103190>

Yang, X., Fang, K., Xia, Y., Wei, Y., & Ren, Y. (2026). Merging to equalize: How billage and town bank M&A narrows the urban–rural income gap. *Habitat International*, 171.
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2026.103764>

YPP Al Fattah Siman Sekaran Lamongan, K., Najiyah, atun, & Khairul Umam, A. (n.d.). *Jurnal matematika & sains analisis jumlah dana desa*. 1(2), 93–98.

Yuswarni, Achmad Firdaus, & Riyanda, R. (2023). The community participation in improving Pendapatan Asli Desa (PADes) and strengthening the community economy in cibereum village, cisarua districts, bogor regency. *Joels: Journal of election and leadership*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.11060>